

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Andi Zainal Abidin Farid, 1981, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Padnya Paramita Jakarta
- Ashhidique Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*
- Atmasasmita, Romli, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita: “Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”*, Kencana, Jakarta
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaan Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Danil, Elwi, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Harahap Krisna 2009, *Pemberantasan Korupsi d Indonesia*, Grafiti, Jakarta
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Harman Benny K., 2012, *Negeri Mafia Republik Koruptor “Menggugat Peran DPR Reformasi”*, Lamalera, Yogyakarta
- Kansil Cst, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Krisnawati, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- Makarim Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Cet III, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara; Jakarta
- Muzaffar Chandra, 1986, *“Wabah Korupsi” dalam Seri Wawasan Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta

- Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, cetakan ke-5, Jakarta: Ghealia Indonesia
- Poerwadarminta WJS, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka Jakarta
- Pusat Bahasa; Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Balai Pustaka
- Salim H dan Nurhadi ES, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Susanto Agus dkk, 2019, *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Sidik Sunaryo, 2021, *Dimensi Keadilan Pluralitas*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, DEEPUBLISH
- Winarno Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

### 3. KARYA ILMIAH

Aldianto Sony, 2021, Pembatalan Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Pemberian Izin Penyadapan, Pengeledahan Dan Penyitaan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ Puu-Xvii/2019 Dalam Perspektif Efektifitas Hukum, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Akbar, A.M.S., 2020. Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad:*

*Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.(1) <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/albalad>

Arifin, Ridwan et.al, 2019, “A Comparative Analysis of Indonesia’s KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption,” *Jambe Law Journal*, Vol. 2.No.2 <https://doi.org/10.22437/jlj.2.2.163-179>

Badjuri Achmad, 2011, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia ( The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.18, No.1 <http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/j002015.pdf>

Eddyono, S.W., 2014. Mengurai Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP. *teropong*, <http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2015/10/TEROPONG-ED-2.pdf#page=34>

Fachrunisa, S., 2021. Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol.1 No.(1) <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/31>

Fitria, R.A., 2017. Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Keadilan*, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2192>

Ginting, Loistra, 2020, “Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi USU, Medan

Gultom, Rio Alexander, Deizen D. Rompas, dan Herry F. D. Tuwaidan, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Lex Privatum*, Vol.XI, No.8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35175/32934>

- Hidayat, M.A., 2019. Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Badamai Law Journal*, Vol.4 No. (1) <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/6047/4974>
- Imran M. Ali, 2021, Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Memberikan Izin Penyadapan, Tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta
- MNVI, S.K., 2021. *Implikasi Yuridis Dewan Pengawas Kpk Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No.21, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12588>
- Yugo Asmoro, 2009, “*Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mudzakkir, 2011, *Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Rachmad, A., 2016. Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11 No.(2), <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/41>

- Salim, H., Kurnia, M. and Azhari, N.D., 2018. Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9 No.(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.830>
- Saragih, Y.M. and Sahlepi, M.A., 2019. *Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1 No.(2). <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/31/44>
- Sosiawan, U.M. and Indonesia, H.A.M.R., 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19 No.(4), <http://dx.doi.org/10.30641/d ejure.2019.V19.517-538>
- Suntoro, A., 2020. Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol .17 No.(1), [https://www.academia.edu/42452900/Penyadapan\\_dan\\_Eksistensi\\_Dewan\\_Pengawas\\_Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi?auto=citations&from=cover\\_page](https://www.academia.edu/42452900/Penyadapan_dan_Eksistensi_Dewan_Pengawas_Komisi_Pemberantasan_Korupsi?auto=citations&from=cover_page)
- Syafrudin Ateng, 2012, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- T Kartika, D., 2021. Rekaman Hasil Penyadapan Tindak Pidana Korupsi sebagai Alat Bukti dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31151>
- Tayib, A. and Sumarni, S., 2020. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menggunakan Alat Penyadapan dalam Penanganan Kasus Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL UNIZAR LAW*

*REVIEW*, Vol.3 No.(1). <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/239>

Telaumbanua, Dalinama 2020 “*Restriktif Status Dewan Pengawas KPK* ”, *Jurnal Education and development* institut Pendidikan Tapanuli Selatan,

Vol.8 No.1 Februari, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1545>

Tjoneng, A., Basani, C.S. and Sidabutar, N., 2020, Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice). *Esensi Hukum*, Vol. 2 No. (2) <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

Umar, Olivia, 2020, “*Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*”, Skripsi Universitas Islam Malang, Malang.

Waluyo Bambang, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.1 No.2, <http://dx.doi.org/10.35586/v1i2.149>

Yunus, A. and Hofi, M.A., 2021. Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol, 1No. (1), <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.35-54>

#### 4. Sumber Lain

Adji Indrianto Seno Dkk, 2016, Pengujian Oleh Publik ( Public Review ) Terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Indonesia Corruption watch Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan

BBC, “Penggeledahan kantor PDIP tunggu persetujuan Dewan Pengawas KPK, Wakil Ketua KPK sebut 'Ada kemungkinan alat bukti hilang, tapi kami

- tidak bisa berbuat lain””, BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51096529>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021
- Gamer Bryan A., ed.2004. *Block's Low Dictionary*, Thomson West, Elgth Edition, St.Paul Minnesota
- Komisi Hukum Nasional Indonesia, 2003, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, MaPPi-FHUI, Jakarta
- Menerjang Arus Oligarki: Lika-Liku Pengungkapan Kasus Suao Komisioner KPU [http://demajusticia.org/wp-content/uploads/2020/01/Menerjang-Arus-Oligarki-2020-01-31-12\\_43\\_28-1.pdf](http://demajusticia.org/wp-content/uploads/2020/01/Menerjang-Arus-Oligarki-2020-01-31-12_43_28-1.pdf) di akses pada tanggal 15 Desember 2021
- Rahayu Amin, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, 7 November 2015, <http://swaramuslim.net/siyasah/more.php>
- Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption*, University Of California Press, Berkeley
- RZK. *Aturan Penyadapan, Perlindungan atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi*,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Press  
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi> di akses pada Hari Senin, 29 November 2021 pukul 02.52 WIB.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHAP*, Muhammadiyah University Pers, Surakarta